

ECO-IMAGINARY: PENDEKATAN UNTUK PENGEMBANGAN KOTA YANG BERKELANJUTAN

Sahala Simatupang

Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Universitas Kristen Indonesia
Kampus UKI, Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta
sahala.simatupang@uki.ac.id

ABSTRACT

The approach taken in the concepts of the development of urban settlements generally is the eco-technic approach or ecological modernization in order to solve the social dan environmental problem in urban. The other approaches has been proposed to compete it that is viewed not to be able to solve completely the social dan environmental problem in urban. This paper discuss the eco-imaginary approach in developing sustainable urban. This approach starts from the understanding that the main cause of social dan environmental problems in urban is the society itself that has urban imaginary that are influenced by capitalism.

Keywords: Sustainable Urban, Eco-imaginary Approach

ABSTRAK

Pendekatan yang diambil dalam konsep-konsep pengembangan permukiman perkotaan pada umumnya adalah pendekatan eco-technic atau ecological modernization untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan di perkotaan. Pendekatan-pendekatan lain juga telah diusulkan untuk menandingi pendekatan di atas yang dianggap tidak sepenuhnya dapat memecahkan masalah sosial dan lingkungan perkotaan. Tulisan ini mendiskusikan tentang pendekatan eco-imaginary dalam pengembangan perkotaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa penyebab utama dari masalah sosial dan lingkungan di perkotaan adalah masyarakat itu sendiri yang mempunyai imaginary tentang ruang perkotaan yang telah diproduksi dengan cara produksi yang dipengaruhi oleh kapitalisme.

Kata kunci: Perkotaan Berkelanjutan, Pendekatan Eco-imaginary

1. PENDAHULUAN

Kota-kota di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perluasan secara fisik sejalan dengan waktu, bukan hanya ke kawasan di dalam kota itu tetapi juga ke kawasan-kawasan di luar kota itu sendiri sebagai dampak dari upaya pembangunan kota melalui proses pengotakan kawasan-kawasan sekitar kota, sehingga terjadi perubahan spasial kota dan kawasan sekitarnya. Perubahan bentuk spasial permukiman perkotaan yang berkembang di kota-kota dunia telah mengancam berlanjutnya lingkungan hidup di perkotaan. Secara umum bentuk spasial yang berkembang telah menghasilkan kinerja keberlanjutan yang negatif pada banyak kota di dunia, baik dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bentuk spasial yang telah terjadi menimbulkan penggunaan sumber daya yang besar dari lingkungan alam seperti lahan, energi, air, material, dan juga pembuangan sampah dan limbah yang besar ke lingkungan alam. Bentuk spasial yang menimbulkan masalah lingkungan dihubungkan kepada pola perkotaan yang dikenal dengan sebutan *urban sprawl*. Masalah lingkungan terjadi karena terkonversinya secara luas lahan hijau dan lahan basah secara besar menjadi lahan terbangun yang menimbulkan kerusakan ekosistem (Arbury, 2005).

Bentuk spasial yang terjadi juga telah menimbulkan ketidakadilan ruang (*spatial injustice*) (Lehman-Frisch, 2011), ketidakadilan sosial (*social injustice*) dan ketidaksetaraan sosial (*social inequality*) (Cook dan Swyngedouw, 2012). Bentuk spasial yang berkembang secara fisik berpola tersegregasi atau tidak bercampur antar kelompok sosial seperti golongan miskin dengan golongan kaya. Pola segregasi (sosial). Ini disebabkan adanya keberpihakan yang lebih kepada masyarakat yang kaya dibanding dengan masyarakat yang miskin untuk menguasai dan menikmati ruang, lingkungan, aksesibilitas kepada fasilitas perkotaan lebih baik dibanding masyarakat miskin (Cook dan Swyngedouw, 2012). Bentuk spasial yang berkembang secara fisik berpola lebih diproduksinya ruang-ruang untuk aktivitas ekonomi yang berorientasi kepada jasa dan industri modern dan global, dan berkurangnya lahan-lahan atau ruang-ruang untuk aktivitas ekonomi lokal atau tradisional (seperti pertanian), sehingga masyarakat yang tidak mampu bekerja di sektor jasa dan industri yang formal hanya bekerja di sektor informal yang sering dengan cara mengokupasi ruang-ruang publik sebagai lahan usahanya.

Untuk mengatasi masalah permukiman perkotaan ini pendekatan pengembangan kota berkelanjutan telah diusulkan. Umumnya pendekatannya adalah pendekatan *eco-technic* yaitu melakukan upaya meminimalkan penggunaan sumber daya dan pembuangan sampah dan emisi melalui penerapan dan pengembangan sains dan teknologi dalam berbagai elemen sistem yang terdapat dalam lingkungan buatan yang diproduksi. Namun pendekatan ini tidak dapat memecahkan masalah lingkungan akibat produksi yang tidak terbatas ruang fisik perkotaan dan masalah ketidakadilan sosial yang dialami penduduk kota tertentu.

Perluasan ruang kota ini dihubungkan kepada urbanisasi yang terus terjadi yang di dalamnya proses modernisasi dan globalisasi diadopsi dan karenanya prinsip-prinsip kapitalisme dan neo-liberalisme dianut. Modernisasi dan globalisasi diadopsi oleh pemerintah yang berkuasa sebagai strategi pembangunan nasional dan menempatkan kota sebagai pusat pembangunan nasional (McGee, 2009). Kapitalisme dan neo-liberalisme telah menjadi ideologi pengembangan kota yang mengusulkan *imaginary* atau pencitraan kota tertentu yang telah menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bahwa masalah lingkungan dan sosial di perkotaan mempunyai hubungan dengan *imaginary* atau pencitraan kota yang dipengaruhi oleh paham kapitalisme dan neo-liberalisme dan mendiskusikan pendekatan *ecological imaginary* sebagai pendekatan untuk menciptakan permukiman perkotaan berkelanjutan

2. Ruang Kota Diproduksi secara Sosial dalam Bentuk *Real* dan *Imagined*

Ruang-ruang yang dibangun di kota dan alam kota tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang adalah penciptanya. Lefebvre (1991) dalam teorinya '*social production of space*', menyatakan bahwa (*social*) *space is a (social) product*. Menurutnya, sebagai implikasi dari teorinya itu adalah *a every society—and hence every mode of production with all its subvariants—produces a space, its own space* dan juga menurutnya implikasinya juga adalah (*physical*) *natural space is disappearing*.

Berbicara ruang kota (*urban space*) dapat dikatakan juga secara bersamaan berbicara alam kota (*urban nature*), karena keduanya adalah hal yang saling mempengaruhi. Produksi ruang kota adalah secara bersamaan proses terjadinya perubahan alam kota sebagai dampak dari produksi ruang kota. Sebaliknya berbicara produksi alam kota adalah proses perubahan alam kota yang terjadi akibat dari diproduksinya ruang kota, hal yang sejalan dengan yang dinyatakan oleh Gandy (2006:62) yaitu:

The production of urban nature is a simultaneous process of social and bio-physical change in which new kinds of spaces are created and destroyed,

ranging from the technological networks that give sustenance to the modern city to new appropriations of nature within the urban landscape.

Lefebvre (1976:15) juga dalam *The Survival of Capitalism* juga menyatakan bahwa: *Nature, destroyed as such, has already had to be reconstructed at another level, the level of "second nature" i.e. the town and the urban. The town, anti-nature or non-nature and yet second nature, heralds the future world, the world of the generalized urban. Nature, as the sum of particularities which are external to each other and dispersed in space, dies. It gives way to produced space, to the urban. The urban, defined as assemblies and encounters, is therefore the simultaneity (or centrality) of all that exists socially.*

Merujuk kepada teori Lefebvre (1991) yaitu *social production of space* ini, produksi ruang kota, yang berarti juga adalah produksi alam kota, adalah proses sosio-spasial (Nasongkhla dan Sintusingha, 2013; Gür, 2002; Heynen *et al.*, 2006). Produksi ruang adalah proses dialektikal antara hubungan ruang dan sosial. Teori ini menyatakan adanya hubungan sosial dan spasial yang bersifat dialek. Gür (2002:238) menyatakan bahwa hubungan masyarakat dan ruang adalah hubungan yang *mutually inclusive* dan *constitutive of each other*.

Dalam kaitannya dengan ruang diproduksi secara sosial Lefebvre (1991) mengusulkan dalam teorinya *social production of space* tiga serangkai konsep ruang dan hubungan yang dialektikal di antara mereka yaitu *spatial practice*, *representations of space*, dan *spaces of representation* dengan pengertian masing-masing sebagai berikut:

a) *Spatial practices*

Konsep ini menyatakan bahwa *the spatial practice of a society secretes that society's space; it propounds and presupposes it, in a dialectical interaction; it produces it slowly and surely as it masters and appropriates it* (Lefebvre, 1991:38). Ruang ini adalah ruang yang riil, bersifat fisik, dibuat dan digunakan (Elden, 2007:110). Ruang ini disebut juga ruang yang dipersepsi (*perceived space*) (Elden, 2007:110). *Spatial practices* merujuk kepada materialisme ruang (Elden, 2007), atau praktek material (Gür, 2002:238). Meskipun *spatial practice* mengandung hubungan yang dekat antara realitas sehari-hari dan realitas perkotaan yaitu mempunyai kekohesifan tertentu, tetapi ia tidak koheren (Lefebvre, 1991).

b) *Representations of space*

Konsep ini menyatakan bahwa ruang sebagai *conceptualized space, the space of scientists, planners, urbanists, technocratic subdividers and social engineers, as of a certain type of artist with a scientific bent - all of whom identify what is lived and what is perceived with what is conceived* (Lefebvre, 1991:38). Ruang ini bersifat mental (Elden, 2007). Ruang adalah *the space of saviour (knowledge) and logic, of maps, mathematics, of space as the instrumental space of social engineers and urban planners, that is, space as a mental construct, imagined space* (Elden, 2009:110,111). *Representations of space* merupakan idealisme ruang. Ruang ini disebut juga ruang yang dikonsepsi (*conceived space*). Konsepsi ruang cenderung menuju sistem tanda-tanda verbal (Lefebvre, 1991).

c) *Representational spaces*

Konsep ini melihat bahwa *space as directly lived through its associated images and symbols, and hence the space of 'inhabitants' and 'users', but also of some artists and perhaps of those, such as a few writers and philosophers, who describe and aspire to do no more than describe* (Lefebvre, 1991:39). Yang ini melihat bahwa *space as produced and modified over time and through its space, spaces invested with symbolisme and meaning, the space of connaissance (less formal or more local forms of knowledge), space as real-and-imagined* (Elden, 2009:111). Ruang ini adalah ruang yang bersifat sosial (Elden, 2007; Pugalis, 2009). Ini adalah ruang yang didominasi dan dialami secara pasif yang diupayakan untuk dirubah dan dikuasai oleh imajinasi oleh para aktor sosial

atau agen sosial (Lefebvre, 1991). *Representational spaces* ini cenderung menuju sistem yang koheren dari simbol dan tanda non-verbal (Lefebvre, 1991).

Ketiga elemen ruang ini, yaitu *spatial practices*, *representation of spaces*, dan *spaces of representation* menyediakan kerangka berpikir yang memperlakukan *the activities of materiality, representation, and imagination as dialectically constitutive of each other* (Gür, 2002:242). Bentuk spasial fisik dan bentuk spasial non-fisik adalah terkandung dalam ketiga konsep ini. *Spatial practice* menghasilkan bentuk spasial fisik. *Representations of space* berisi konsep-konsep ruang dalam yang dibuat oleh ahli ruang kota atau pemerintah berdasarkan ide atau ideologi tertentu. *Spaces of representation*, mengandung bentuk fisik dan non-fisik yaitu bentuk fisik diisi dengan imajinasi tertentu di dalamnya yang menyatakan kondisi keberadaan riilnya mereka.

Jadi ruang kota diproduksi oleh masyarakat dalam wujud fisik (*physical*) dan mental (*mental*), benda (*thing*) dan pikiran (*thought*), nyata (*real*) dan dicitrakan (*imagined*). Ruang perkotaan yang dialami dan dihidupi, yang disimbolkan, direpresentasikan oleh dan merepresentasikan para aktor tertentu yang mempunyai kekuatan (*power*) tertentu dengan cara produksi tertentu yang masing-masing yang mungkin berbeda sehingga mungkin ada konflik-konflik di dalamnya. Siapa aktor yang paling mendominasi ruang kota tertentu akan diproduksi dengan cara produksinya sendiri.

Bentuk kota juga dapat dipikirkan atau didefinisikan sebagai hal yang bersifat non-fisik. Ini menyangkut apa yang dalam benak atau pikiran masyarakat tentang pola, susunan, dan struktur kota. Bentuk kota yang bersifat fisik adalah bentuk kota yang bersifat *real*, sedangkan bentuk kota yang non-fisik adalah bentuk kota yang bersifat *imagined*. Harjoko (2011) telah memberi istilah kepada keduanya ini terkait permukiman perkotaan sebagai bentuk (*form*), untuk yang bersifat non-fisik, dengan wujud (*shape*) untuk yang bersifat fisik. Wujud (*shape*) adalah kondisi obyektif dari apa yang diserap dan direkapikir, sedangkan bentuk (*form*) adalah kondisi subyektif dari apa yang diserap dan direkapikir. Dengan merujuk kepada istilah ini, bentuk kota (yang non-fisik) dapat didefinisikan untuk penelitian ini sebagai ide masyarakat terkait pola, susunan, dan struktur kota. Ini dapat disebut juga citra (*image*) tentang ruang kota.

Ide, atau citra (*image*), masyarakat, tentang pola, susunan, dan struktur kota mengandung seperangkat arti atau makna, atau dalam konteks budaya adalah makna atau arti budaya. Dalam konteks budaya ide terkait bentuk kota ini dapat digolongkan sebagai budaya non-material. Macionis (2012) menyatakan beberapa hal tentang budaya: budaya adalah cara berpikir, cara bertindak, dan obyek-obyek material yang secara bersama membentuk cara hidup masyarakat; budaya berbicara tentang pikiran dan benda; budaya non-material adalah ide-ide yang diciptakan oleh anggota-anggota masyarakat, sedangkan budaya material adalah benda-benda fisik yang diciptakan oleh anggota-anggota masyarakat; dan budaya non-material mempunyai kaitan dengan budaya material, karena budaya non-material memberi pedoman bagaimana budaya material seharusnya diproduksi dan digunakan. Kedua jenis bentuk ruang kota ini adalah *knowledge* masyarakat terkait bentuk ruang kota.

Tentang ide-ide masyarakat tentang ruang kota dan bentuk spasial kota ini Prigge (2008) menyatakan beberapa hal yaitu ide ini umumnya diproduksi oleh kelompok aktor tertentu yaitu para spesialis kota yaitu arsitek, perencana kota, ahli geografi, dan ahli sosial kota, dan juga oleh pemerintah; ide kemudian dijadikan ideologi ruang kota dan menjadi ideologi dominan dari kehidupan sehari-hari kota; ide ruang kota ini menjadi ide yang regulatif dan melembaga dan berupaya menemukan simbol-simbolnya yang tepat dalam berbagai jenis obyek fisik. Prigge (2008) menyatakan juga bahwa lewat ideologi ruang ini ruang-ruang aksi yang dipersepsi dan dihidupi dan struktur-struktur spasial yang dikonsep secara sains dan teknologi dikoordinasikan; dengan ideologi ini ruang kota dan kemudian bentuknya dan kemungkinan-kemungkinan penggunaannya menyusun formasi yang diskursif; dalam ideologi yang diciptakan oleh

ahli ruang kota ini, masyarakat tidak memproduksi ide-ide tentang kondisi riil kehidupan (*existence*) individu-individu, tetapi hanya konsepsi-konsepsi tentang hubungan individu-individu ke kondisi riil kehidupan (*existence*) mereka; hubungan ini yang menjadi penyebab adanya distorsi *imaginary* dari representasi ideologi dari dunia riil.

Imaginary sosial ini dapat dipahami sebagai *a mythologized, but internalized set of cultural meanings* (Neamtu dan Leuca, 2007:79, mengutip Zulkin *et al.*, 1998). Ide atau citra *imaginary* kota ini secara tidak langsung mempengaruhi untuk diproduksinya bentuk kota yang bersifat fisik, karena ide inidengan makna budaya di dalamnya akan dimaterialkan dan menjadi riil dalam praktek-praktek sosial dan praktek-praktek spasial (Pugalis, 2009). Ide ini dibuat konkret dalam struktur-struktur spasial. Ide ini menjadi penuntun bagaimana yang fisik diproduksi dan digunakan.

3. IMAGINARY SOSIAL DIPENGARUHI PAHAM KAPITALISME DAN NEO-LIBERALISME

Imaginary sosial yang menimbulkan masalah keberlanjutan dapat dihubungkan kepada modernisasi dan globalisasi yang terjadi di kota-kota di dunia termasuk Indonesia. Modernisasi dan globalisasi diadopsi dalam pembangunan nasional dan dijadikan sebagai pusat pembangunannya karena hal-hal ini dipercaya dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bangsa, yang untuk hal ini dibuat kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pembangunan untuk terjadinya modernisasi dan globalisasi dalam proses produksi ruang-ruang perkotaan (McGee, 2009). Modernisasi dan globalisasi telah diadopsi untuk pembangunan daerahnya oleh pemerintah-pemerintah daerah Jakarta sejak pascakolonial, bahkan pada masa kolonial, sampai sekarang ini (Douglass, 2010; Lo, 2010; Kusno, 2004, 2007; Bunnell dan Miller, 2011, Pratiwo dan Nas, 2005; Winarso, 2005, 2010; Simone dan Rao, 2011).

Pengembangan kotanya yang telah mengijinkan terjadinya proses modernisasi dan globalisasi di dalamnya, maka ide atau citra kota bentuk kota hal yang ada dalam benak para aktor telah dipengaruhi oleh paham-paham modern dan juga paham kapitalisme dan neo-liberalisme yang adalah inheren dalam proses modernisasi dan globalisasi. Jadi ideologi ruang kota adalah paham-paham ini. *Imaginary* sosial diproduksi mengikuti paham-paham itu. Representasi-representasi dari ideologi ruang kota ini diproduksi dalam berbagai disiplin atau bidang. Prigge (2008:53) memberi contoh:

Modern "functionalism" in architecture and urban planning, for example, is the representation of this ideology of urban space as it is lived in the material acts of individuals. It symbolizes the imaginary, "naturally" and normatively separated, relations of individuals to their real, interdependent living conditions.

Ide dan citra kota pemisahan fungsi ruang ini mendasari dibangunnya fungsi hunian dari fungsi pendukungnya yang telah menghasilkan pola *urban sprawl*. Pemisahan fungsi ini direproduksi dan dibuat objektif dalam cara-cara bicara setiap hari atau dalam ruang-ruang kerja, hunian, atau rekreasi, hal yang menjadi objek dari pengetahuan ruang yang spontan. Prigge (2008:53) juga menyatakan bahwa *From the standpoint of reproduction, the "satellite town" is an ideological apparatus where the lived ideology of spatial separation becomes materialized through everyday practice.*

Modernisasi dan globalisasi yang di dalamnya paham kapitalis dan neo-liberal dianut menimbulkan ide atau citra kota atau ruang kota bahwa kota adalah komoditas (Cook dan Swyngedouw, 2012) yaitu lanskap kota yang dapat diolah untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya oleh masyarakat global dengan cara tertentu. Agar ruang kota yang adalah komoditas dapat diberdayakan secara ekonomi, maka upaya pemasaran kota dilakukan oleh banyak kota-kota di dunia (Kavaratzis, M., 2004). Terkait dengan pemasaran kota, Neamtu dan Leuca (2007:76) menyatakan *City marketing was concerned primarily with "selling" the city to various target groups -*

existing and prospective residents, businesses, and tourists for example, in pursuit of economic gains. Untuk ini pengusulan branding tertentu terhadap kota dilakukan (Kavaratzis, M., 2004; Kavaratzis, M. dan Ashworth, G.J., 2005). Ide dan *image* kota yang mempunyai kaitan dalam upaya memasarkan kota membuat branding tertentu diformulasikan (Kavaratzis, M., 2004; Kavaratzis, M. dan Ashworth, G.J., 2005).

Paham global juga telah menyebabkan tidak ada lagi batas dalam pengembangan ruang untuk tujuan keuntungan ekonomi suatu negara. Jaringan global dikembangkan seluas-luasnya bukan hanya dalam bentuk *place space* tetapi juga *flow space*, misalnya dalam bentuk jalan-jalan tol yang dapat menjangkau seluruh tempat untuk mendapatkan sumber daya ekonomi (Lo, 2010). Dibangunnya skala proyek yang besar juga mempunyai hubungan dengan globalisasi karena skala ekonomi menentukan pemaksimalan keuntungan. Proyek-proyek skala besar atau skala global adalah persyaratan investasi global (Swyngedouw et al., 2002; Douglass, 2010). Proyek-proyek skala besar yang terlihat di Jakarta ini adalah industri, perumahan skala besar, bangunan sangat tinggi, superblok, kota baru (*new town*), jalan tol (Winarso, 2010; Lo, 2010). Pengembangan perkotaan dengan cara produksi yang kapitalis dan liberalis telah dipahami menyebabkan kerusakan lingkungan alam (Douglass, 2010; Cook dan Swyngedouw, 2012; Swyngedouw dan Heynen, 2003; Lo dan Marcotullio, 2000), segregasi sosial, ketidakadilan sosial (Cook dan Swyngedouw, 2012; Swyngedouw dan Heynen, 2003; Winarso, 2005), hidup dalam ketidakpastian (Simone dan Rao, 2011). Cara produksi yang kapitalis dan neo-liberalis juga membutuhkan bentuk tata kelola yang dicirikan oleh prioritas-prioritas yang lebih diarahkan oleh elit dan kurang demokratis (Swyngedouw et al., 2002).

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh cara kapitalis dan neo-liberalisme adalah dampak dari konversi lingkungan alam (lahan hijau dan lahan basah) yang sebesar-sebesarnya dan terus menerus untuk mendapatkan lahan dan sumber daya lainnya (seperti energi dan material) melalui penciptaan ruang kota dengan mengubah kawasan pertanian dan kawasan hijau lain yang merupakan hinterland kota dan ekosistem kota. Lingkungan alam akan terus dijadikan komoditas dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Masalah sosial yang ditimbulkan oleh cara kapitalis dan neo-liberalisme dikaitkan susunan ruang yang terbentuk yang menghasilkan kondisi tidak tercampur atau tersegregasi masyarakat miskin dengan masyarakat lain (masyarakat kaya), terdesaknya ke pinggiran masyarakat tertentu yaitu umumnya masyarakat yang miskin atau tidak berdaya secara ekonomi, yang menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan masyarakat khususnya yang miskin. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Lefebvre (1991:386) terkait sentralisasi yaitu bahwa *the centre gathering things together only to the extent that it pushes them away and disperses them*. Juga Nasongkhla dan Sintusingha (2013:1873) menyatakan bahwa *The centrality is concurrently a product of conflicting socio-spatial 'homogenisation- differentiation' processes that exacerbate contradictions, segregate and alienate everyday life*.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh cara kapitalis dan neo-liberalisme dikaitkan hilangnya berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tertentu yang mengandalkannya dari pertanian; dan berkurangnya sumber daya ekonomi sebagai dampak dari susunan ruang yang terbentuk yang mengkonversi *hinterland* kota menjadi lahan terbangun sehingga lahan pertanian (Houghton, G., 1997; McGee, 2009) menjadi kecil sebagaimana kita lihat di Jabodetabek (Purnomo, 2000). Ini akan menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat ini menurun, bahkan menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat yang kehilangan lahan pertaniannya sementara tidak punya keahlian lain selain bertani.

4. KONSEP PERMUKIMAN PERKOTAAN KEBERLANJUTAN

Masalah lingkungan dan sosial yang terjadi di perkotaan umumnya penyebabnya dihubungkan kepada penggunaan sumber daya alam yang boros dan pembuangan limbah dan emisi yang besar dalam proses metabolisme kota sebagai dampak dari desain dan pola atau susunan ruang dan operasi lingkungan buatan tertentu yang diproduksi di perkotaan. Eksploitasi sumber daya dari lingkungan dan pembuangan limbah dan emisi yang besar ke lingkungan yang semakin meluas telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan mata pencaharian sebagian masyarakat yang tidak berdaya yang menimbulkan kemiskinan dan tersisihnya masyarakat ini dan terpaksa bermukim dalam lingkungan yang buruk dan tidak layak huni.

Penggunaan sumber daya lahan yang boros atau tidak efisien penyebabnya umumnya dihubungkan kepada pola atau susunan ruang-ruang kota yang disebut *urban sprawl*. Bentuk kota ini telah berkembang di kota-kota di dunia dan dinyatakan berdampak negatif kepada kinerja keberlanjutan perkotaan (Camagni et al., 2002). *Urban sprawl* merujuk kepada perluasan batas perkotaan ke pinggiran kota dengan menkorversi secara tidak efisien lahan pertanian yang produktif dan lahan yang merupakan elemen ekosistem (Arbury, 2005). Pembangunan berpola *urban sprawl* umumnya bercirikan *leapfrog development*, *strip or ribbon development*, *low-density development*, dan *single-dimensional development* (Holcombe, 1999). *Urban sprawl* menyebabkan lahan-lahan *hinterland* kota ini rusak dan berkurang yang selama ini menjadi penyedia sumber daya kota (McGee, 2009).

Konsep-konsep bentuk kota berkelanjutan untuk melawan *urban sprawl* telah diusulkan yaitu *neotraditional development*, *urban containment*, *compact city*, *eco-city* (Jabareen, 2006). Konsep-konsep terkait kota yang berkelanjutan yang di dalamnya terjadi minimal penggunaan sumber daya dan pembuangan limbah dan emisi dalam proses metabolismenya sehingga hubungan kota dan *hinterland*-nya tetap lestari juga diusulkan yaitu *re-designing city*, *externally dependent city*, *self-reliance city*, dan *fair share city* (Houghton, 1997). Semua konsep-konsep ini dapat digolongkan dalam pendekatan *eco-technic*.

Pendekatan-pendekatan lain untuk mencapai setiap dimensi dari permukiman perkotaan yang berkelanjutan telah banyak yang diusulkan oleh berbagai pihak. Masing-masing pendekatan ini yang diajukan sesuai dengan citranya tentang permukiman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan keberlanjutan khususnya lingkungan dan sosial. Pendekatan-pendekatan permukiman berkelanjutan yang berkembang dalam upaya mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial secara garis besar dapat dikelompokkan sebagaimana yang dilakukan oleh Simon Guy dan Graham Farmer (2001) dalam artikelnya *Reinterpreting sustainable architecture: the place of technology*, yaitu mengidentifikasi enam alternatif logika desain ekologis yang mempunyai konsepsi yang berbeda tentang *environmentalism*. Guy dan Farmer (2001) menyimpulkan bahwa keberlanjutan adalah jauh dari 'single coherent ideology', melainkan dibentuk dari enam 'logic' yang saling berkompetisi. Premisnya adalah individu, kelompok, lembaga mempunyai persepsi yang berbeda luas tentang apa itu inovasi lingkungan. Masing-masing aktor ini mungkin membagi komitmen ke desain berkelanjutan tetapi berbeda besar dalam interpretasi penyebab ketidakberlanjutan dan solusinya. Apa yang dikemukakan oleh Guy dan Farmer (2001:141-146) tentang keenam logika itu secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. *Eco-technic logic*

Pendekatan ini didasarkan pada diskursus yang technorational dan berorientasi kebijakan dan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyediakan solusi kepada masalah lingkungan. Disini mempromosikan modernisasi yang ekologis (ecological modernization) yang mengindikasikan tentang the possibility of overcoming the environmental crisis without leaving the path of modernization.

- Paradigma modernisasi ekologis mempunyai titik padang globalisasi. Perhatiannya terutama pada masalah lingkungan yang universal dan global seperti perubahan iklim dan pemanasan global dan apa yang diperlukan untuk menghadapi isu-isu demikian adalah *centralized national and global action*. Sumber pengetahuan lingkungannya adalah *technorational* dan *scientific*.
- b. *Eco-centric Logic*
Pendekatan ini berdasarkan pada diskursus yang menekankan interaksi dinamis antara “yang hidup” dan “yang tak hidup” sebagai yang saling bergantung. Pendekatan ini menggabungkan ilmu ekologi dengan etika. Tanggung jawab manusia kepada lingkungan adalah penatalayanan, yang pelaksanaannya ditentukan oleh kendala biofisik dan batas-batas yang berasal bukan dari kebutuhan manusia, tetapi dari dalam alam itu sendiri. Sudut pandang pendekatan ini adalah bahwa alam dipandang sebagai rapuh dan di mana keseimbangan alam mudah terganggu. Karena itu keberlanjutan memerlukan perlindungan ekosistem dan modal alam yang segera dan penuh kehati-hatian. Gambaran *ecocentric* tentang lingkungan buatan menekankan dampak negatifnya terkait lingkungan. Sumber pengetahuan lingkungannya adalah *systemic ecology* dan *metaphysical holism*.
- c. *Eco-aesthetic logic*
Dalam pendekatan ini peran arsitektur berkelanjutan adalah metaforikal dan menginspirasi dan menyampaikan peningkatan identifikasi dengan alam dan dunia nonmanusia melalui bahasa baru dalam seni bangunan. Logika ini menekankan spiritualitas dalam hubungan sosial dan lingkungan dan mengandung dimensi *New Age* yang kuat. Paham *New Age* adalah visi kaum idealis yang mulai dengan refleksifitas individual dan kesadaran ekologis dan tahap demi tahap menuju ke pendirian tentang *whole new civilitation and cultures*. Titik mulainya untuk perubahan adalah berasal dari *convergence of views inherent in eastern philosophies and postmodern science*. Logika ini memberi penekanan pada individual creativity dan imajinasi bebas yang dikombinasikan dengan pemandangan romantis alam yang menolak rasionalisme Barat, modernisme, dan materialis. Solusi untuk krisis lingkungan adalah pergeseran dari nilai-nilai utilitarian kepada pandangan yang di dalamnya nilai-nilai yang estetis dan sensuous memainkan peran penting. Sumber pengetahuan lingkungannya adalah *sensual postmodern, science*.
- d. *Eco-cultural Logic*
Logika eko-budaya menekankan reorientasi mendasar dari nilai-nilai untuk terlibat dengan masalah lingkungan dan budaya. Pendekatan bukanlah mempromosikan pengembangan budaya universal yang baru, melainkan pelestarian keragaman budaya yang ada. Isu simboliknya adalah keaslian dan gagasan bahwa lingkungan buatan yang benar-benar berkelanjutan perlu untuk lebih berhubungan dengan konsep lokalitas dan tempat. Penekanan pada tempat, atau lokus genius, dimaksudkan untuk menetralkan kekurangan ruang modernis yang abstrak dan adalah reaksi terhadap globalisme dari *International Style*. Tanggung jawab etikanya adalah untuk melawan fenomena universalisasi yang lazim di dalam budaya modern. Dalam logika ini disarankan agar pendekatannya harus bergerak menjauh dari metodologi desain yang universal dan yang berbasis teknologi karena ini tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dari tempat atau masyarakat tertentu. Sumber pengetahuan lingkungannya adalah *phenomenology, cultural ecology*.
- e. *Eco-medical logic*
Pendekatan ini terkait dengan perhatian kaum humanis dan perhatian sosial bagi kelangsungan kesehatan individual. Pendekatan ini mengkaitkan kesehatan individual dengan lingkungan yang sehat, kesehatan individu dikondisikan oleh lingkungan eksternal. Retorika medisnya memusatkan perhatian pada dampak

yang merugikan dari lingkungan buatan, dan pada penyebab stres yang menimbulkan masalah kesehatan, secara fisik dan psikologis. Pendekatan ini menganggap penerapan teknologi sebagai operasi tidak bebas risiko dan pengurangan intensitas teknologi bangunan (atau masyarakat) tidak selalu menyebabkan kesejahteraan berkurang, sebaliknya bahkan menyebabkan kesejahteraan meningkat. Sumber pengetahuan lingkungannya adalah *medical clinical, ecology*.

f. *Eco-social Logic*

Pendekatan ini memperluas agenda sosial keberlanjutan di luar perhatian bagi individu menjadi mencakup diskursus politik yang mengusulkan bahwa akar penyebab krisis ekologi berasal dari faktor sosial yang lebih luas. Pendekatan ini membahas isu simbolik tentang demokrasi sebagai kunci ke masyarakat ekologis, berpandangan bahwa hanya melalui model komunitas yang dibuat untuk melayani kebutuhan dan tujuan umum, di mana manusia mengalami kebebasan sejati dan realisasi diri individu, mereka akan dapat hidup harmonis dengan alam. Dalam logika ini perusakan lingkungan dan teknologi dipahami sebagai bentuk dominasi manusia, semakin hirarkis dan menindas sifat suatu masyarakat, semakin besar kemungkinan bahwa ia akan menyalahgunakan dan mendominasi lingkungan. Sumber pengetahuan lingkungannya adalah *sociology social, ecology*.

Pendekatan-pendekatan di atas belum mempertimbangkan aspek politik, padahal ruang kota diproduksi oleh aktor-aktor tertentu yang mempunyai kekuasaan tertentu. Pendekatan terkait aspek politik telah diusulkan yaitu pendekatan *eco-political*. Dasar dari pendekatan ini adalah kota sebagai *socio-ecological process* dan formasi lingkungan perkotaan terbentuk dari *power-laden socio-ecological relations* (Heynen et al., 2006; Cook dan Swyngedouw, 2008). Penggunaan dan transformasi lingkungan alam oleh masyarakat menghasilkan lingkungan sosial dan lingkungan fisik kota yang dibentuk oleh hubungan-hubungan kekuasaan politik. Lingkungan sosial dan lingkungan fisik kota direpresentasi oleh dan merepresentasi politik. Karena itu masalah lingkungan dan sosial yang ada kota diciptakan oleh hubungan-hubungan kekuasaan yang tidak setara. Mereka yang berkuasa mampu untuk mengendalikan siapa yang punya akses sumber daya, kualitas sumber daya ini dan siapa dapat memutuskan bagaimana sumber daya digunakan (Swyngedouw dan Heynen, 2003). Pendekatan ini memahami bahwa aksi politik yang dengan yang kekuatannya mampu memproduksi permukiman perkotaan yang sejalan dengan aspirasi, kebutuhan, dan keinginan mereka yang mendiami ruang-ruang perkotaan namun mampu tetap menjaga kapasitas lingkungan alam untuk memproduksi lingkungan fisik dan sosial yang di dalamnya manusia tinggal (Heynen et al., 2006). Sumber pengetahuan lingkungannya untuk pendekatan ini adalah *urban political ecology*.

Meskipun dalam pendekatan *urban political ecology* telah melihat bahwa para aktor yang mempunyai kekuasaan tertentu yang dominan yang akan berperan dalam menentukan diproduksinya ruang kota, namun apa yang ada dalam benak para aktor belum terlihat padahal yang menentukan seperti apa ruang ingin diproduksi oleh para aktor adalah ide atau citra tentang ruang kota. Adanya ide atau citra sesuatu yang terkait dengan pola, susunan, dan struktur ruang kota yang ada dalam benak masing-masing aktor masyarakat ini yang mempengaruhi diproduksinya ruang fisik kota yang menimbulkan masalah keberlanjutan di perkotaan, maka pendekatan yang mempertimbangkan ide atau citra terkait bentuk spasial kota perlu dilakukan, karena ide dan citra yang ada dalam benak masyarakat akan dimaterialkan dalam praktik-praktik spasial dan praktik-praktik sosialnya. Sehubungan dengan hal ini *eco-imaginary* diusulkan sebagai pendekatan dalam konsep permukiman kota berkelanjutan.

Pendekatan *eco-imaginary* melihat bahwa *imaginary* sosial tentang ruang perkotaan dan makna tempat yang dikonstruksi mempunyai dampak riil pada lingkungan perkotaan. Pendekatan ini melihat adanya koherensi antara susunan sosial dan ruang

dan lingkungan alam yang diperoleh dalam dan lewat makna budaya yang dilekatkan kepada ruang kota tertentu. Sumber pengetahuan lingkungannya dapat merujuk kepada *urban political ecology*.

Melalui pendekatan ini dapat diajukan hipotesis yaitu ide atau citra terkait kota yang dapat menciptakan kota yang berkelanjutan adalah ide bahwa kota adalah tempat tinggal bersama. Dalam ide mengandung arti adanya komitmen untuk berbagi ruang di antara penduduk kota yang terdiri dari berbagai keragaman (ras, agama, status sosial, kondisi ekonomi).

5. KESIMPULAN

Dari uraian di atas diperlihatkan bahwa ruang perkotaan, dan sebagai konsekuensinya produksinya, haruslah dipandang sebagai *real* dan *imagined* yaitu bahwa ada realitas material dan dunia simbolik dan makna-makna budaya dalam ruang perkotaan. Makna-makna budaya dari *imaginary* sosial dilekatkan kepada ruang perkotaan bukan hanya dikonseptualkan dalam bahasa simbolik, tetapi makna-makna ini juga dimaterialkan dan dijadikan riil dalam semua jenis praktik spasial dan paraktik sosial.

Ketidakterlajutan perkotaan secara lingkungan dan sosial adalah dampak dari *imaginary sosial* tertentu yang telah diproduksi dengan cara-cara kapitalis dan neo-liberalis yang inheren dalam proses modernisasi dan globalisasi yang diijinkan terjadi dalam pembangunan. *Imaginary* sosial ini menjadi ideologi ruang perkotaan. Sebagai ideologi ruang perkotaan dari paham-paham ini, konsep-konsep perkotaan diproduksi oleh spesialis-spesial kota dan direpresentasikan dalam konstruk-konstruk spasial. Namun *imaginary* sosial ini dengan paham-paham ini telah diketahui menyebabkan masalah terkait lingkungan dan sosial akibat dari pematerialian dan praktik-praktik yang ditimbulkannya.

Konsep permukiman perkotaan dengan pendekatan *eco-imaginary* mencoba memecahkan masalah sosial dan lingkungan kota melalui penciptaan *imaginary* sosial dari berbagai aktor masyarakat yang terlibat dalam produksi ruang kota yang tidak menimbulkan konflik lingkungan dan sosial. Dengan konsep ini mau diingatkan bahwa sumber utama dari masalah sosial dan lingkungan adalah masyarakat itu sendiri dan apa yang ada dibenaknya tentang ruang kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbury, J., 2005. *From Urban Sprawl to Compact City – An analysis of Urban Growth Management in Auckland*. Tesis dari Geography and Environmental Science, University of Auckland, Auckland
- Bunnell, T. Dan Miller, M.A., 2011. "Jakarta in Post-Suharto Indonesia: Decentralisation, Neo-liberalism and Global City Aspiration", *Space and Polity*, Vol. 15, No. 35-48, hal. 35-48
- Carmagni, R., Gibelli, M.C., Rigamonti, P., 2002. "Urban mobility and urban form: the social and environmental cost of different patterns of urban expansion", *Ecological Economics*, Vol. 40, hal. 199-216
- Douglass, M., 2010. "Globalization, mega-projects and the environment: Urban form and water in Jakarta", *Environment and Urbanization ASIA*, Vol. 1, No. 1, hal. 45-65
- Elden, S. 2007. "There is politics of space because space is political: Henry Lefebvre and the production of space", *Radical Philosophy Review*, Vol. 10, No. 2, hal. 101-116
- Gandy, M., 2006. "Urban nature and the ecological imaginary". Dalam: Heynen, N., Kaika, M., dan Swyngedouw, E. (editor), *In the Nature of Cities Urban political ecology and the politics of urban metabolism*, hal. 62-72. London dan New York: Routledge

- Guy, S. dan Farmer, G., 2001. Reinterpreting sustainable architecture: the place of technology, *Journal of Architectural Education*, Vol. 54, No. 3, hal. 140–148
- Gür, B. F., 2002. "Spatialisation of *power/knowledge*/discourse: transformation of urban space through discursive representations in Sultanahmet, Istanbul", *Space and Culture*, Vol. 5, No. 3, hal. 237-252
- Harjoko, T.Y., 2011. "Fenomena Bentuk dan Wujud Arsitektural: Antara Materialis, Representasi dan Muatan Kehidupan Keseharian dari Permukiman Kampung Perkotaan", *Nalars*, Vol. 10, No.2, hal. 131-153
- Haughton, G., 1997. "Developing sustainable urban development models", *Cities*, Vol. 14, No. 4, hal. 189-195
- Heynen, N., Kaika, M., dan Swyngedouw, E., 2006. "Urban political ecology: Politicizing the production of urban natures". Dalam: Heynen, N., Kaika, M., dan Swyngedouw, E. (editor), *In the Nature of Cities Urban political ecology and the politics of urban metabolism*, hal. 1-19. London dan New York: Routledge
- Jabareen, Y.R., 2006. "Sustainable urban forms", *Journal of Planning Education and Research*, Vol. 26, hal. 38-52
- Kavaratzis, M., 2004. "From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands", *Place Branding*, Vol. 1, No. 1, hal. 58–73
- Kavaratzis, M. dan Ashworth, G.J., 2005. "City branding: an Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick?", *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, Vol. 96, No. 5, hal. 506–514
- Lechman-Frisch, S., 2011. "Segregation, spatial (in)justice, and the City", *Berkeley Planning Journal*, Vol. 24, No. 1, hal. 70-90
- Lefebvre, H., 1976. *The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production*. London: Allison and Busby
- Lefebvre, H., 1991. *The Production of Space*. Diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith. Maiden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing
- Lo, R.H., 2010. "The City as a Mirror: Transport, Land Use and Social Change in Jakarta", *Urban Studies*, Vol. 47, No. 3, hal. 529-555
- Macionis, J.J., 2012. *Sociology*. Edisi ke 14. Pearson.
- McGee, T.G., 2009. The Spatially of Urbanization: The Policy Challenges of Mega-Urban and Desakota Regions of Southeast Asia, UNU-IAS Working Paper No. 16
- Neamtu, B. dan Leuca, C.R., 2007. "From competing urban imaginaries to cohesive city brand - New challenges for local government", *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, No. 21 E, hal. 73-85
- Nasongkhla, S. dan Sintusingha, S., 2013. "Social production of space in Johor Baru", *Urban Studies*, Vol. 50, No. 9, hal. 1836-1853
- Pratiwo dan Nas, P.J.M., 2005. "Jakarta: Conflicting directions". Dalam: *Directors of Urban Change in Asia*. New York: Routledge, hal. 68-82
- Prigge, W., 2008. "Reading The Urban Revolution: Space and Representation". Dalam: Goonewardane, K., Kipler, S., Milgrom, R., Schmid, C. (editor), *Space, Difference, Everyday Life: Reading Henry Lefebvre*. New York and London: Routledge, hal. 46-61
- Pugalis, L., 2009. "A Conceptual and Analytical Framework for Interpreting the Spatiality of Social Life", *FORUM Ejournal*, No. 9 77-98
- Purnomo, A.B., 2000. "Jakarta, parasite city and city of parasites". Dalam: Dubois-Taine, G., & Henriot, C. (editor), *Cities of the Pacific Rim: Diversity & Sustainability. Plan Urbanisme Construction Architecture (puca)*, hal. 131-143
- Swyngedouw, E. dan Heynen, N., 2003. "Urban political ecology, justice dan the politics of scale", *Antipode*, Vol. 35, hal. 898-918
- Swyngedouw, E., Moulart, F., dan Rodriguez, A., 2002. "Neoliberal urbanization in Europe: Large-scale urban development projects and the new urban policy", *Antipode*, hal. 547-580

- Swyngedouw, E. dan Heynen, N.C, 2003. " Urban Political, Ecology, Justice and the Politics of Scale, *Antipode*, hal 899-918
- Winarno, H., 2005. *City for the Rich*. Makalah pada 8th International Conference of the Asian Planning Schools Association, 11-14th September 2005
- Winarno, H., 2010. "Urban Dualism in the Jakarta Metropolitan Area". Dalam: Sorensen, A. & Okata, J. (editor), *Megacities: Urban Form, Governance, and Sustainability*. Springer. Hal. 163-190.